

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sungai Malili memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Jalur ini merupakan urat nadi logistik vital yang menghubungkan wilayah pedalaman Luwu Timur yang kaya nikel dengan pesisir Teluk Bone. Signifikansi jalur ini telah diakui sejak era Kedatuan Luwu hingga masa kolonial. Oleh karena itu, militer Jepang kemudian memanfaatkan aliran sungai tersebut sebagai jalur mobilisasi pasukan dan angkutan logistik demi mengamankan sumber daya material selama perang di Asia Tenggara.

Sebagai bukti autentik sejarah tersebut, terdapat bangkai kapal perang Jepang yang kandas di titik strategis sungai ini. Keberadaannya membuktikan bahwa Sungai Malili merupakan gerbang masuk penting yang diperebutkan untuk menguasai distribusi sumber daya alam pada masa pendudukan. Penemuan armada ini menambah khazanah peninggalan perang global di Nusantara yang kaya akan informasi strategi militer dan aktivitas logistik masa lalu (Herianti, 2018).

Secara legal, bangkai kapal perang Jepang di Sungai Malili telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Bawah Air yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 (Republik Indonesia, 2010). Hal ini menegaskan bahwa situs tersebut bukan sekadar tumpukan besi tua yang tidak bernilai. Sebagai warisan budaya yang berusia lebih dari lima puluh tahun, situs ini menjadi repositori informasi krusial mengenai dinamika Perang Dunia II di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara.

Namun, urgensi pelestariannya tidak hanya bersandar pada aspek legalitas formal semata. Keberadaan situs ini berkaitan erat dengan identitas historis dan memori kolektif masyarakat Luwu Timur terhadap sejarah maritim dunia. Situs ini menyimpan jejak perjuangan lokal yang menjadikannya bagian tak terpisahkan dari lanskap budaya masyarakat Malili (Salempang, 2015).

Dalam upaya menjaga keberlangsungannya, pelestarian Cagar Budaya harus mencakup pencegahan dan penanggulangan kerusakan. Hal ini dilakukan melalui tindakan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran. Salah satu langkah perlindungan terpenting adalah penetapan zonasi. Langkah ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang, baik pada skala kawasan maupun situs, agar nilai-nilai aslinya tetap terjaga.

Cagar Budaya sendiri merupakan saksi bisu perjalanan panjang peradaban bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Berdasarkan amanat undang-undang, warisan ini meliputi benda, bangunan, struktur, situs, hingga kawasan, baik yang berada di darat maupun di air. Keberadaannya mutlak dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan (Prasetyo, 2018).

Sayangnya, lokasi-lokasi bersejarah seperti Sungai Malili kerap menghadapi tantangan serupa, yakni pencurian material logam dan kurangnya pendataan menyeluruh. Padahal, benda-benda dari armada Jepang ini memiliki nilai informasi yang sangat besar. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk menghentikan laju kerusakan melalui langkah pelestarian yang terstruktur.

Sejalan dengan prinsip revitalisasi, penelitian ini juga mendorong perubahan paradigma ekonomi masyarakat. Saat ini, ketergantungan warga pada eksploitasi pasir sungai sering kali bertolak belakang dengan upaya konservasi. Sebagai solusinya, ditawarkan transformasi menuju pengembangan ekowisata sejarah. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi tanpa merusak fisik situs.

Dengan menjadikan kapal perang ini sebagai pusat edukasi publik, identitas Luwu Timur sebagai daerah bersejarah akan semakin kokoh. Adaptasi ini dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan masa kini tanpa mengurangi nilai penting aslinya (Rahardjo, 2013). Pariwisata dalam hal ini menjadi sarana efektif bagi masyarakat untuk mengambil inspirasi dari peradaban masa lalu (Siswanto, 2007).

Tanpa dukungan pariwisata, nilai-nilai penting dalam Cagar Budaya akan sulit dikomunikasikan kepada masyarakat secara menarik. Dalam konteks ini, pariwisata dan pelestarian membentuk hubungan simbiosis mutualisme. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, pemerintah telah mensinergikan regulasi melalui UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Menilik sejarah yang lebih luas, perairan Indonesia memang telah menjadi jalur pelayaran ramai sejak abad ke-10 hingga ke-19. Wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi berfungsi sebagai bandar perdagangan global (Pardosi, 2016). Bukti nyata dari aktivitas ini adalah banyaknya reruntuhan kapal karam di bawah laut yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan. Situs-situs bawah laut ini menyimpan informasi berharga tentang migrasi, perdagangan, dan budaya yang harus dilindungi dari risiko penjarahan (Agus, 2014; Puspita & Wardana, 2023).

Saat ini, situs di Sungai Malili menghadapi ancaman serius dari erosi, abrasi, serta aktivitas manusia yang tidak terkontrol. Penambangan pasir sungai menjadi dilema; di satu sisi menjadi sumber penghidupan, namun di sisi lain berisiko merusak struktur kapal. Jika tidak segera ditangani dengan sistematis, Indonesia berisiko kehilangan aset sejarah maritim global dan memori kolektif masyarakat yang tak ternilai harganya.

Oleh karena itu, upaya pelestarian harus dihubungkan dengan kesejahteraan warga agar berdampak nyata. Pergeseran pemanfaatan sungai dari eksploitasi material alam menuju ekowisata sejarah adalah langkah strategis. Melalui transisi ini, taraf hidup masyarakat dapat meningkat tanpa harus mengorbankan identitas budaya mereka.

Kajian ini hadir untuk mengintegrasikan multidisiplin ilmu sejarah, arkeologi, dan ekonomi guna menutup kesenjangan data yang ada. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal menjadi kunci utama. Keberhasilan proyek di Sungai Malili ini diharapkan menjadi preseden bahwa perlindungan warisan budaya bawah air mampu berjalan selaras dengan penguatan ekonomi kreatif daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini secara komprehensif mengkaji kondisi terkini dari Bangkai Kapal Perang Jepang di Sungai Malili sebagai berikut:

1. Apa saja faktor utama yang menyebabkan Kerusakan pada situs bangkai kapal perang Jepang di Sungai Malili?
2. Bagaimana strategi pelestarian yang efektif dan adaptif terhadap karakteristik lingkungan fluvial Sungai Malili?
3. Bagaimana peran serta masyarakat lokal dalam menjaga dan melestarikan situs sebagai bagian dari cagar budaya bawah air?

1.3 Tujuan Dan Manfaat

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis:

1.3.1 Tujuan Akademis (Kontribusi Keilmuan)

- Melakukan pemetaan detail dan audit fisik struktur bangkai kapal perang Jepang di Sungai Malili serta tingkat degradasinya.
- Menganalisis faktor-faktor perusak situs, baik yang bersumber dari proses alamiah misalnya erosi, sedimentasi, biofouling (penempelan organisme laut pada permukaan kapal) maupun aktivitas manusia.
- Merumuskan protokol konservasi bawah air yang mengacu pada standar internasional, khususnya UNESCO 2001.
- Menyusun literatur praktik terbaik pengelolaan situs bangkai kapal perang sebagai referensi bagi pengembangan arkeologi bawah air di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Praktis (Strategi Pelestarian & Ekowisata)

- Menghasilkan pedoman teknis pengelolaan yang mencakup prosedur pemantauan rutin dan mitigasi risiko kerusakan.

- Membangun model manajemen partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam pelestarian situs.
- Mengembangkan basis data ekowisata sejarah sebagai landasan kebijakan pariwisata berkelanjutan di Luwu Timur.
- Meningkatkan kesadaran publik melalui edukasi terstruktur untuk mencegah penjarahan dan penambangan ilegal

1.4 Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi kuat dengan kajian ini adalah skripsi karya Salempang (2015) yang berjudul "Situs Kapal Karam di Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan". Dalam penelitian tersebut, Salempang memberikan kontribusi penting berupa data dasar deskriptif mengenai identifikasi fisik bangkai kapal sebagai armada milik Jepang. Analisis Salempang menjadi titik berangkat bagi penulis untuk memahami subjek arkeologis secara teknis. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus kajian; jika Salempang menitikberatkan pada aspek nautikal dan identifikasi situs, penelitian penulis melangkah lebih jauh pada aspek manajemen pelestarian yang sistematis. Penulis melakukan pembaruan data mengingat degradasi fisik yang terjadi sejak 2015 akibat penambangan pasir, sekaligus merumuskan strategi perlindungan yang lebih aplikatif di masa kini.

Selanjutnya, kajian Herianti (2018) mengenai potensi informasi sejarah militer dari sisa-sisa Perang Dunia II di Nusantara memberikan konteks yang mendasar untuk studi ini. Herianti menekankan bahwa bekas armada Jepang bukan hanya objek statis, tetapi merupakan bagian dari jaringan logistik global yang sangat penting. Analisis yang dilakukan oleh Herianti memberikan dukungan kepada penulis dalam memperkuat pendapat tentang "Nilai Penting" dari bangkai kapal di Sungai Malili dalam konteks sejarah nasional. Dengan memahami kerangka makro yang disampaikan oleh Herianti, penulis mampu menempatkan lokasi Sungai Malili sebagai unit mikro yang signifikan dalam sejarah maritim dunia, sehingga pentingnya upaya pelestariannya memiliki dasar argumentasi yang lebih kuat secara teoritis.

Aspek penggunaan dan ketahanan ekonomi dalam studi ini banyak merujuk pada pemikiran Siswanto (2007) dalam artikelnya "Pariwisata dan Pelestarian Warisan Budaya". Siswanto menyoroti pentingnya simbiosis antara konservasi dan pariwisata agar situs budaya dapat bertahan secara mandiri. Penulis mengadopsi gagasan ini sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara pelestarian lokasi dan penghidupan masyarakat penambang pasir di Malili. Analisis yang dilakukan Siswanto diintegrasikan ke dalam penelitian ini untuk mengembangkan argumen bahwa pelestarian bangkai kapal Jepang tidak perlu selalu bersifat eksklusif-statis, melainkan dapat dihidupkan kembali melalui ekowisata sejarah yang menawarkan pilihan ekonomi bagi penduduk lokal.

Artikel karya Puspitawati dan Wardana (2023) Mengenai penerapan perlindungan terhadap warisan budaya bawah laut di Indonesia, penelitian ini menawarkan perspektif kritis mengenai aspek-aspek legalitas. Penelitian mereka mengungkapkan kekurangan dalam regulasi yang sering kali membuat situs bawah laut menjadi rentan terhadap tindakan pencurian. Bagi penulis, tinjauan ini sangat penting untuk mengidentifikasi masalah hukum yang dihadapi lokasi Sungai Malili, terutama berkenaan dengan pencurian logam. Penulis mengadopsi sudut pandang Puspitawati dan Wardana untuk merancang pendekatan pelestarian yang tidak hanya bergantung pada hukum yang tertulis, tetapi juga melibatkan langkah-langkah praktis seperti zonasi dan penguatan pengamanan fisik di lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Noerwidi (2007) mengenai bangkai kapal "USS Liberty" yang terletak di Tulamben, Bali, menyajikan sebuah model keberhasilan "etno konservasi", di mana komunitas setempat terlibat secara aktif dalam menjaga kelestarian sekaligus mendapatkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan. Walaupun model ini difokuskan pada ekosistem laut, prinsip kerjasama antara pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat menjadi acuan yang penting. Berdasarkan analisis kasus tersebut, penelitian ini merumuskan langkah-langkah adaptasi strategis yang sesuai dengan karakteristik ekologis unik dari Sungai Malili sebagai berikut.

1. Rekonstruksi Nilai dan Edukasi Arkeologi

Belajar dari Tulamben, langkah awal di Malili adalah mentransformasi paradigma masyarakat agar tidak lagi memandang bangkai kapal sebagai "besi tua", melainkan aset wisata sejarah tawar melalui model susur sungai berbasis edukasi.

2. Tata Kelola Partisipatif Penambang Pasir

Mengadopsi pola keterlibatan warga Bali, strategi di Malili mengintegrasikan penambang pasir lokal ke dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Transformasi peran mereka menjadi pemandu atau pengawas situs diharapkan mampu menghentikan aktivitas destruktif secara persuasif melalui peluang ekonomi baru.

3. Stabilitas Struktural pada Ekosistem Fluvial (Novelty)

Berbeda dengan arus laut, situs Malili terpapar dinamika arus sungai, sedimentasi, dan abrasi yang masif. Penelitian ini menawarkan kebaruan teknis dalam metode stabilisasi struktur kapal guna meminimalisir pergeseran posisi pada lingkungan perairan darat.

4. Regulasi Zonasi Jalur Transportasi Air

Prinsip zona lindung Tulamben diadaptasi untuk mengatur jalur transportasi sungai. Regulasi difokuskan pada pengendalian getaran mesin dan hempasan baling-baling perahu yang melintas guna mencegah percepatan kerusakan fisik pada struktur kapal yang rapuh.

5. Naratologi Sejarah dan Diplomasi Budaya

Kekuatan narasi pada situs Liberty diimplementasikan di Malili dengan memperkuat identitas situs sebagai memori kolektif Perang Dunia II. Hal ini membuka peluang diplomasi budaya dan kerja sama riset internasional, khususnya dengan pemerintah Jepang.

6. Mitigasi Antropogenik melalui Pusat Informasi

Penyediaan informasi di Malili direncanakan melalui pembangunan pusat informasi di tepian sungai. Langkah ini berfungsi sebagai instrumen konservasi preventif untuk menekan risiko kerusakan akibat aktivitas manusia melalui pemahaman sejarah yang lebih mendalam.

Melalui tinjauan terhadap berbagai penelitian di atas, penulis memposisikan kajian ini sebagai upaya integratif yang menggabungkan aspek arkeologis, hukum, dan ekonomi. Jika penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada salah satu dimensi saja, maka kebaruan dari penelitian penulis terletak pada penyusunan rencana pelestarian yang menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur cagar budaya di Sungai Malili tetap terjaga secara fisik serta menjamin bahwa keberadaannya dapat memberikan manfaat kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya melalui pendekatan revitalisasi yang terukur.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul "Strategi Pelestarian Bangkai Kapal Perang Jepang di Sungai Malili Sebagai Struktur Cagar Budaya" Keseluruhan penelitian akan disusun menjadi lima bab. Penyajian hasil analisis data disampaikan secara naratif dan dituangkan dengan ragam bahasa ilmiah, gambar, dan tabel. Penjelasan spesifik setiap bab adalah sebagai berikut.

Bab I: Pada Bab ini berisi tentang penjelasan terkait latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan hasil penelitian yang relevan serta sistematika penulisan yang digunakan.

Bab II: Pada Bab ini membahas terkait lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Bab III: Pada Bab ini membahas mengenai data dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Bab IV: Berisi tentang Strategi Pelestarian Bangkai Kapal Perang Jepang

Bab V: Berisi tentang kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian, keterbatasan yang dihadapi selama penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

METODE DAN LOKASI PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan intensif tentang objek serta konteks sekitarnya. Secara umum, metode penelitian dimaknai sebagai langkah-langkah ilmiah yang terstruktur untuk mendapatkan data empiris, dengan maksud dan fungsi tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah (Sugiyono, 2019). Dalam konteks ini, penerapan metode penelitian berperan untuk menetapkan batasan isu, arah analisis, serta objektivitas di setiap fase pembahasan (Ramadhan, 2021). Adapun tahapan teknis pengumpulan data dalam penelitian ini disusun secara kronologis dan sistematis sebagai berikut:

2.1.1 Pengumpulan Data

a) Penelusuran Arsip

Penelitian tahap awal dilakukan dengan meneliti arsip dan mengkaji literatur untuk menyusun kerangka historis objek. Pencarian informasi arsip dilaksanakan secara menyeluruh melalui saluran digital dan fisik, termasuk dokumen. Pemerintah dan militer Jepang melalui Arsip Diplomatik Jepang serta Pusat Sejarah Korea dan Asia Jepang (JACAR) untuk menemukan catatan operasional armada. Selain itu, penelusuran juga dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan melalui kajian berbagai jurnal sejarah serta arkeologi maritim untuk mendapatkan data pembandingan mengenai aktivitas logistik militer di Sulawesi selama kancah peperangan global berlangsung.

b) Data lapangan:

1. Observasi: Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui pengamatan langsung di area situs yang berada di muara Sungai Malili. Observasi ini dilakukan secara mendalam pada 24 September 2025, dengan penekanan utama pada pengidentifikasian kondisi fisik material kapal yang tersisa di permukaan air maupun yang tertutup sedimen. Secara teknis, pengamatan adalah metode pengumpulan informasi melalui observasi sistematis dan pencatatan langsung pada keadaan fisik dan perilaku objek di area penelitian (Murni, 2008). Tujuan dari tahap ini ialah untuk menggambarkan dinamika lingkungan sungai serta proses interaksi masyarakat. pada lokasi, dan mencatat fenomena yang terjadi secara objektif di lapangan (Tersina, 2018).



Gambar 1. Melakukan Observasi pada Bagian-bagian Kapal

(Dok. Haikal Singkang, 2025)

2. Deskripsi: Informasi yang didapatkan dari pengamatan kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi arkeologi yang mendalam dan teknis. Langkah ini meliputi pengenalan elemen-elemen struktur kapal seperti palka, lengan mast (boom), serta sisa-sisa komponen mesin yang masih dapat dikenali secara morfologis. Deskripsi ini juga mencakup analisis tingkat kerusakan material yang disebabkan oleh faktor lingkungan akuatik (korosi dan abrasi) serta dampak aktivitas manusia di sekitar lokasi, untuk menilai nilai signifikansi dan kondisi integritas objek sebagai struktur Cagar Budaya (Tanudirjo, 2003).
3. Dokumentasi: Guna memastikan ketepatan data visual, teknik dokumentasi diselenggarakan lewat pengambilan foto dan video menggunakan alat kamera digital beresolusi tinggi. Dokumentasi lapangan yang dilakukan antara 25 September hingga 05 Oktober 2025 ini bertujuan untuk merekam rincian ornamen, konfigurasi spasial objek terhadap garis pantai, serta mendokumentasikan bukti-bukti kerusakan fisik kapal secara rinci. Dokumentasi ini berperan sebagai data tambahan yang sangat penting dalam mendukung narasi deskriptif serta berfungsi sebagai bukti yang sah mengenai keadaan terbaru situs di Sungai Malili.



Gambar 2. Melakukan Dokuentasi di beberapa bagian kapal

(Dok. Haikal Singkang, 2025)

4. Studi Pustaka: kajian dari bahan tertulis seperti kumpulan jurnal, artikel, dsb.
5. Wawancara: Guna melengkapi data arkeologis dengan perspektif sejarah lisan, dilakukan wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat dan warga Desa Balantang. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait memori kolektif masyarakat mengenai keberadaan kapal, keyakinan lokal yang berkembang, serta persepsi mereka terhadap upaya pelestarian. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji interaksi sosiokultural antara komunitas lokal dan struktur cagar budaya tersebut, yang akan menjadi dasar dalam merancang strategi pemanfaatan dan perlindungan yang berfokus pada kearifan lokal.



Gambar 3. Melakukan wawancara kepada warga sekitar (Dok. Haikal Singkang, 2025)



Gambar 4. Melakukan wawancara kepada warga sekitar (Dok. Haikal Singkang, 2025)

2.1.2 Penggunaan Alat Kecerdasan Buatan

Dalam upaya menjaga integritas akademik dan transparansi metodologis, peneliti menggunakan penggunaan instrumen berbasis Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam penyusunan skripsi ini. Pemanfaatan teknologi AI diterapkan secara terbatas sebagai alat pendukung operasional, yang mencakup beberapa aspek berikut:

1. Pengolahan Cerita dan Sintesis Informasi: Pemanfaatan Model Bahasa Besar (LLM) digunakan untuk mendukung proses sistematisasi catatan dari lapangan, peningkatan struktur bahasa, dan penguatan konsistensi logika dalam penulisan draf agar sesuai dengan standar penulisan ilmiah yang resmi.

2. Alih Bahasa Literatur: Teknologi AI digunakan sebagai perangkat bantu awal dalam menerjemahkan sumber kearsipan dan literatur asing seperti dokumen operasional militer Jepang atau data teknis perkapalan sebelum kemudian dilakukan verifikasi makna secara mandiri dan manual oleh peneliti.
3. Pemetaan Pola Strategi: Instrumen AI dimanfaatkan untuk membantu mengidentifikasi pola-pola dari data kualitatif guna mempermudah peneliti dalam menyusun kerangka awal draf strategi pelestarian yang sistematis dan aplikatif.

Peneliti menegaskan bahwa seluruh data primer, termasuk hasil observasi langsung di muara Sungai Malili pada 24 September 2025 serta hasil wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat Desa Balantang, merupakan data orisinal yang dikumpulkan secara mandiri oleh peneliti melalui kegiatan lapangan. Penggunaan AI dalam penelitian ini murni bersifat sebagai alat bantu (tool) untuk mengemas dan menganalisis data, bukan sebagai pengganti proses berpikir kritis maupun pengambilan keputusan ilmiah. Oleh karena itu, seluruh hasil interpretasi arkeologis, analisis signifikansi sejarah, hingga rumusan akhir draf strategi pelestarian sepenuhnya merupakan hasil olah pikir mandiri dan tanggung jawab intelektual peneliti.

2.1.3 Analisis Data

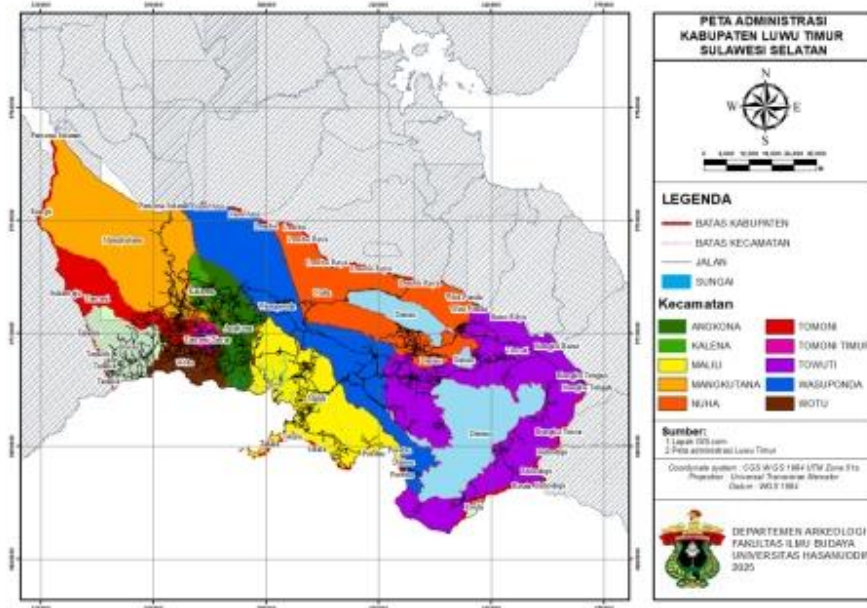
Proses analisis data dilakukan secara terencana setelah semua informasi dari lapangan dikumpulkan secara kolektif. Proses ini dimulai dengan pengkondensasian data, di mana peneliti memilih dan merangkum hasil transkrip wawancara serta catatan observasi yang berkaitan dengan aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Bangkai Kapal Jepang di Sungai Malili. Data yang telah disusun kemudian dikategorikan untuk memetakan hubungan antara kondisi fisik objek dan berbagai faktor yang memengaruhi keberadaannya, baik dalam hal dukungan maupun hambatan terhadap konservasi.

2.1.4 Interpretasi Data

Dengan mengaitkan data sejarah serta arkeologi, bangkai kapal perang Jepang di Sungai Malili diinterpretasikan tidak hanya sebagai sisa tentera yang sudah tidak berfungsi, tetapi juga sebagai lambang yang menyimpan memori kolektif tentang tragedi pertempuran dan elemen kemanusiaan. Berdasarkan struktur lanskap budaya maritim, lokasi itu berfungsi sebagai area interaksi antara tindakan manusia dan ekosistem perairan, di mana bangunan kapal berfungsi sebagai 'rekaman fisik' yang menyimpan catatan sejarah pertahanan di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan yang diterapkan harus melampaui dimensi fisik dengan menekankan pada nilai-nilai sejarah yang inherent. Di samping itu, pengkajian mendalam mengenai atribut arkeologi lokasi ini menjadi dasar strategis untuk pengelolaan warisan budaya maritim untuk mengembangkan pendidikan masyarakat. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan penghargaan terhadap Cagar Budaya bawah air sekaligus mempertegas identitas maritim Indonesia dalam pandangan masyarakat.

2.2 Letak Administrasi

2.2.1 Administrasi Kabupaten Luwu Timur



Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur (Sumber: Mahesa, 2025)

Kabupaten Luwu Timur, yang terletak di ujung timur Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, merupakan sebuah wilayah yang kaya akan potensi sumber daya alam dan keindahan alam yang memukau, dengan Malili sebagai pusat pemerintahannya. Secara geografis, kabupaten ini membentang pada koordinat 2°03'00"-3°03'25" Lintang Selatan dan 119°28'56"-121°47'27" Bujur Timur, menempatkannya pada posisi strategis di antara berbagai wilayah penting. Batas-batas daerah ini mencakup Provinsi Sulawesi Tengah di utara, yang menawarkan akses kepada berbagai peluang sosial dan ekonomi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone di selatan, yang menghadirkan potensi dalam sektor perikanan dan pariwisata laut, serta Kabupaten Luwu Utara di barat, yang berfungsi sebagai penghubung krusial dalam jaringan transportasi dan perdagangan di kawasan tersebut.

2.3 Sejarah Kabupaten Luwu Timur

Perjalanan panjang pembentukan Kabupaten Luwu Timur penuh dengan suka duka bagi para penggagas, yang kini menjadi hikmah berharga untuk pembangunan daerah di masa depan. Berikut kronologisnya:

- Tahun 1959: Akibat situasi keamanan yang tidak kondusif akibat pemberontakan yang menghancurkan kawasan termasuk kota Malili, semangat untuk membangun kembali wilayah malili. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 menetapkan bahwa eks Onder-Afdeling di Sulawesi

Selatan akan menjadi kabupaten, namun Malili beserta dua daerah lainnya belum dapat diwujudkan karena faktor keamanan.

- b. Tahun 1963: DPRD-GR Luwu mengeluarkan resolusi yang menyetujui pembentukan Kabupaten Malili, kemudian diikuti resolusi lain yang mengusulkan pembagian Dati II Luwu menjadi empat kabupaten baru termasuk Malili.
- c. Tahun 1966: DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyetujui pembentukan Kabupaten Malili. Mahasiswa dari wilayah eks Kewedanaan Malili berperan aktif dalam mendesak dan mensosialisasikan keputusan tersebut melalui perjalanan panjang dari Makassar ke berbagai wilayah, menghadapi banyak rintangan. Pada pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan, disampaikan bahwa pembentukan Malili tinggal menunggu waktu, dan kemudian panitia persiapan menghadap Sekjen Depdagri yang akan mengirim tim ke daerah.
- d. Tahun 1999: Era reformasi membuka peluang untuk melanjutkan perjuangan. Saat pemekaran Kabupaten Luwu berlangsung, masyarakat menginginkan realisasi pembentukan kabupaten sesuai amanat UU tahun 1959. DPRD Provinsi mengusulkan pembentukan kabupaten untuk Masamba dan Malili, serta peningkatan status Palopo. Meskipun belum terealisasi, masyarakat menggelar pertemuan akbar pada 2000 dan membentuk panitia persiapan, yang kemudian diikuti keputusan DPRD Luwu Utara tentang pemekaran menjadi Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur.
- e. Tahun 2002-2003: DPRD Provinsi menyetujui usul pemekaran, dan Gubernur mengusulkannya ke Menteri Dalam Negeri. Akhirnya, UU Nomor 7 Tahun 2003 menyetujui pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara. Kabupaten Luwu Timur diresmikan pada 3 Mei 2003, dan pada 12 Mei 2003 dilakukan serah terima pemerintahan serta pembukaan pintu gerbang perbatasan. Meskipun secara administratif berdiri sendiri, Kabupaten Luwu Timur yang berjudul Bumi Batara Guru tetap terikat secara budaya dan historis dengan Tanah Luwu, serta menunjukkan kemajuan pesat di berbagai bidang.

2.4 Historis Kolonialisme di Malili

Periode kemunculan Jepang di daerah Malili dimulai pada tahun 1942, setelah Belanda menyerah dalam rangka Perang Dunia II. Peralihan kekuasaan ini menghasilkan perubahan struktural yang penting bagi wilayah yang sekarang termasuk dalam Kabupaten Luwu Timur. Tidak seperti administrasi kolonial yang lalu, Jepang menerapkan kebijakan militer yang lebih cenderung represif dan eksploitasi.

Perhatian utama pemerintah Jepang di Malili tertuju pada pengambilan sumber daya alam, terutama nikel dan bijih besi, yang merupakan bahan penting bagi sektor perindustrian senjatanya. Akibatnya, lokasi-lokasi tambang warisan Belanda dihidupkan kembali dengan tingkat aktivitas yang lebih tinggi. Situasi ini memaksa masyarakat setempat untuk bekerja dalam keadaan yang ekstrem di bawah sistem kerja paksa tanpa imbalan yang pantas. Selain penggerakan tenaga kerja, masyarakat juga

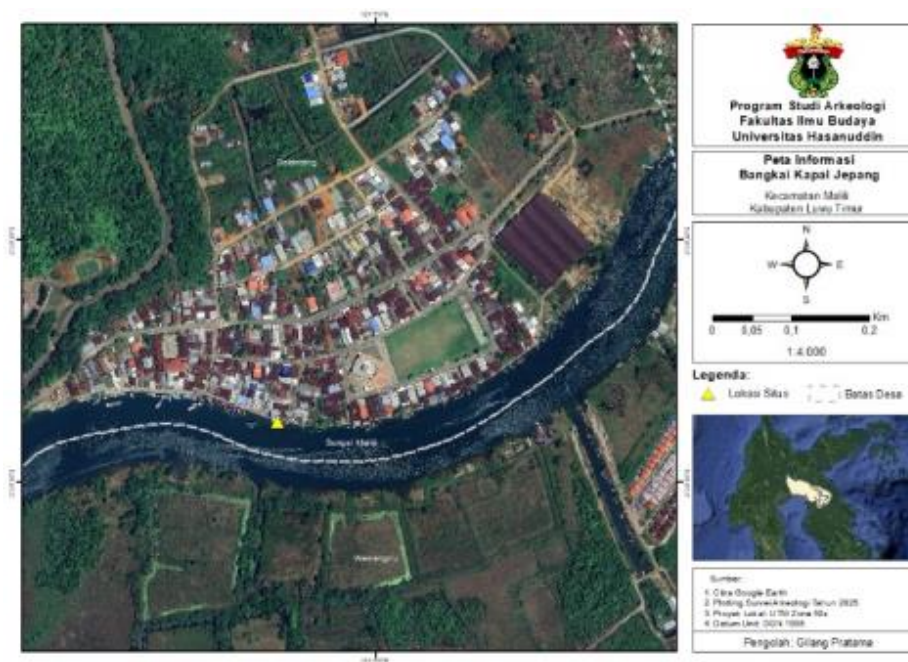
diharuskan menyerahkan hasil bumi untuk keperluan logistik militer, yang menyebabkan krisis ekonomi yang mendalam dan kelangkaan sumber daya pokok, (Dilenia & Troa, 2018).

Dari segi sosial, kehidupan warga Malili berada di bawah kontrol militer yang sangat ketat. Pemerintah Jepang secara signifikan membatasi hak untuk berpendapat dan menerapkan hukuman berat, termasuk penyiksaan hingga eksekusi tanpa proses pengadilan bagi individu yang dianggap subversif. Secara terencana, mereka berusaha menghilangkan pengaruh budaya Barat melalui pendidikan dan propaganda budaya untuk menanamkan ideologi Jepang.

Walau menghadapi banyak tekanan, semangat nasionalisme komunitas tetap berkobar. Perlawanan yang dilakukan secara rahasia dan tindakan sabotase terhadap fasilitas militer dilakukan oleh kelompok-kelompok setempat. Fenomena ini mencerminkan tekad masyarakat Malili untuk terbebas dari pengaruh asing.

Masa gelap ini berakhir pada tahun 1945 seiring dengan kekalahan Jepang oleh pasukan sekutu. Kabar penyerahan Jepang yang diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 disambut dengan penuh euforia oleh masyarakat Malili. Meskipun kemudian mereka harus menghadapi usaha rekolonisasi Belanda, pengalaman pahit selama tiga setengah tahun di bawah kekuasaan Jepang telah meninggalkan kesan yang mendalam. Masa pendudukan yang padat namun penuh trauma ini pada akhirnya mampu memperkuat karakter serta semangat nasionalisme kolektif

2.5 Lokasi Penelitian



Gambar 6. Peta Lokasi Penelitian (Sumber: Gilang Pratama, 2026)

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 24 September sampai 10 Oktober 2025 di Situs Bangkai Kapal Perang Jepang di Sungai Malili yang terletak di Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Situs Ini Terletak di Pinggiran Sungai Malili yang secara historis menjadi saksi bisu aktivitas armada Jepang di masa lampau. Di lokasi ini, terdapat sebuah artefak besar berupa Bangkai Kapal perang yang berada dalam posisi miring ke kanan dan terdeposit secara parsial di pinggir aliran Sungai. Sebagian besar struktur badan kapal tampak masih bersandar pada tepian tanah Sungai, menciptakan sebuah lanskap budaya yang unik di mana elemen sejarah menyatu dengan lingkungan perairan. Posisi kemiringan dan letak kapal yang strategis di pinggir Sungai ini menjadi dasar utama dalam menyusun strategi pelestarian struktur Cagar Budaya tersebut agar tetap terjaga dari ancaman abrasi dan kerusakan alami.

Visualisasi peta ini mengenali letak strategis dari reruntuhan kapal perang aset Jepang yang terletak di pesisir Sungai Malili, Desa Balantang, Kabupaten Luwu Timur. Terletak di kawasan perairan dengan nilai ekologis serta historis yang besar, web ini jadi objek krusial untuk riset arkeologi dasar air dan upaya proteksi peninggalan maritim.

Secara geografis, Sungai Malili yang mengalir dari pegunungan Luwu Timur mengarah Laut Jawa mempunyai debit air yang normal. Tetapi, keseriusan curah hujan yang besar di daerah ini menimbulkan web tersebut sangat terekspos terhadap resiko abrasi, sedimentasi, serta transformasi lanskap sungai secara natural. Keberadaan bangkai kapal di tepian sungai mencerminkan interaksi dinamis antara objek memiliki dengan area alamnya, membentuk suatu lanskap budaya yang terus tumbuh sampai dikala ini.

Desa Balantang, selaku pemukiman terdekat, mempunyai signifikansi historis sekaligus kemampuan besar selaku garda terdepan dalam melindungi kelestarian web tersebut. Keterikatan emosional dan ketergantungan masyarakat setempat pada sungai menciptakan peluang signifikan untuk penerapan program pelestarian yang melibatkan komunitas.

Oleh sebab itu, peta ini tidak semata-mata jadi instrumen penanda posisi, namun pula representasi visual yang menghubungkan artefak sejarah dengan keadaan geografis dan dinamika sosial warga. Dengan mengintegrasikan bukti diri geografis serta partisipasi lokal, strategi pelestarian yang lebih komprehensif, pas sasaran, serta berkepanjangan bisa diformulasikan secara maksimal.

2.5.1 Sejarah Lokasi Penelitian

a. Asal-Usul Nama Balantang dan Pemukiman Awal

Sejarah Balantang mencakup rentang waktu yang panjang, dimulai dari aktivitas nelayan yang mencari hasil laut di kawasan Teluk Bone. Dahulu, kelompok nelayan dari Malangke yang dipimpin oleh To Sompe To Giling sering melakukan penangkapan ikan secara berkelompok dengan menggunakan pukuk lingkak yang disebut "*Mappanambe*".

Suatu hari, ketika mereka menyusuri anak Sungai yang dangkal dekat pulau Bulu Puloe, perahu besar mereka yang disebut "mantang" atau "tang" kandas akibat pasir laut. Karena tidak dapat menggerakkan perahu lagi, mereka memutuskan untuk tinggal sementara di pesisir pantai tersebut. Perahu mereka memiliki bagian atap yang menyerupai rumah atau "bola", sehingga tempat tersebut kemudian dinamai "Bola Tang" yang berarti rumah yang kandas.

Setelah kembali ke Malangke, To Giling mengajak sanak keluarga untuk menetap kembali di "Bola Tang". Mereka membangun rumah sederhana dan terus menjalankan aktivitas sebagai nelayan. Tempat ini mulai ramai oleh pemukim baru, hingga akhirnya dilaporkan kepada Mintjara Malili (yang diperintah oleh ayah A. Mappiare). To Giling kemudian diangkat sebagai kepala kampung pertama. Permukiman awal di wilayah ini diawali dekat tahun 1925, dengan dekat 50 rumah, serta diperkirakan sebagian besar penduduknya berasal dari Malangke. Mereka pula berhubungan dengan nelayan dari wilayah orang sebelah semacam Langkara, Lakawali, Lampia, Bubu, serta cerekang.

b. Masa Pergolakan dan Pengungsian (1953–1960)

Pada tahun 1953, kawasan Malili dilanda kekacauan akibat masuknya laskar Permesta dan DI/TII ke berbagai perkampungan. Untuk mencari perlindungan, sebagian besar masyarakat yang tinggal di muara Malili termasuk warga Balantang melakukan pengungsian besar-besaran. Sebagian berlindung ke kota Malili, sebagian lainnya menyebar ke Sulawesi Tenggara atau bersembunyi di hutan. Warga Balantang pada saat itu banyak tinggal di daerah yang kini disebut Patande.

Kondisi ini berlangsung beberapa tahun hingga 10 Januari 1959, ketika terjadi peristiwa di Malili yang membuat kota ini dibumihanguskan akibat pengumpulan antara DI/TII dan Tentara Indonesia. Sebagian besar warga Malili terpaksa mengungsikan diri ke kota Palopo. Perang baru mereda sekitar tahun 1960 setelah Malili dinyatakan aman dari pemberontakan. Setelah kota berhasil direbut kembali oleh tentara, pengungsi mulai kembali ke Malili dan berpusat di dalam kota, meskipun kepala kampung masing-masing kelompok tetap menjalankan tugasnya.

c. Perpindahan Tempat Tinggal dan Pembentukan Desa

Pada tahun 1962, pemerintah kecamatan yang dipimpin oleh A. Mannang menginstruksikan agar warga Balantang pindah menetap di sekitar Lapangan Terbang Birawa. Lapangan ini merupakan bekas landasan pacu yang digunakan sejak zaman Belanda untuk pendaratan pesawat helikopter dan pesawat capung, hingga kini masih meninggalkan jejak sejarah berupa peninggalan kapal perang Belanda yang disebut "*Kappala Telengge*".

Kepala Kampung saat itu, La Mahe Dg. Mallewa, memimpin warganya untuk pindah ke daerah baru tersebut. Setahun kemudian (tahun 1963), kampung Malili dibentuk menjadi pemerintahan desa yang membawahi beberapa kepala kampung, termasuk kampung "B". Kepala Desa Malili pertama adalah Masyur Kasir, dengan jumlah warga Balantang yang tinggal di sekitar Lapangan Birawa sudah mencapai ratusan jiwa.

d. Pergantian Pimpinan dan Pembentukan Desa Balantang

Pada tahun 1967, Kepala Desa Masyur Kasir wafat dan digantikan oleh Usman (pegawai Kecamatan Malili). Usman sendiri meninggal pada tahun 1969, sehingga pada 1 Januari 1970 M. Amin Samat ditunjuk sebagai penggantinya. Pada saat yang sama juga terjadi pergantian kepala kampung dari La Mahe Dg. Mallewa ke Laati Dg. Paci'da.

Antara tahun 1988-1989, di bawah kepemimpinan Kepala Desa Husein (purnawirawan tentara), beberapa desa baru dibentuk di Kecamatan Malili, antara lain Wewangriu, Ussu, dan Baruga (yang mencakup Balantang dan Lagaroang). Pada tahun 1996, Desa Baruga dimekarkan menjadi dua desa terpisah, yaitu Desa Baruga dan Desa "Balantang" yang mengambil nama dari sebutan awal "Bola Tang".

e. Hubungan Masyarakat dengan Sungai dan situs

Interaksi masyarakat di sepanjang Sungai Malili terhadap situs Bangkai Kapal memperlihatkan pola hubungan yang ambivalen. Meskipun Sungai diakui sebagai sumber penghidupan primer, orientasi pelestarian Cagar Budaya sering kali terfragmentasi oleh kebutuhan ekonomi praktis. Penduduk setempat mengidentifikasi situs tersebut sebagai Kapal Tenggelam (*Kappala Telengge*) yang dianggap sebagai elemen natural dari bentang perairan, namun belum terdapat manifestasi kearifan lokal yang secara khusus ditujukan untuk proteksi formal situs tersebut. Secara historis, pemanfaatan situs cenderung bersifat oportunistik, seperti praktik pengambilan material besi kapal untuk komoditas ekonomi mendesak. Selain itu, secara fungsional, sisa struktur kapal tersebut kerap dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai titik penambatan perahu nelayan setelah beraktivitas atau saat memenuhi kebutuhan logistik harian.

f. Konteks Sosial-Ekonomi dan Tantangan Terkini

Kondisi situs Bangkai Kapal perang Jepang saat ini berada dalam ancaman serius akibat tekanan aktivitas sosial-ekonomi di kawasan Sungai Malili. Tingginya intensitas lalu lintas perahu nelayan dan penyeberangan menimbulkan getaran arus serta turbulensi mesin yang secara akumulatif mempercepat laju abrasi Sungai dan degradasi struktur kapal yang telah mengalami pelapukan. Selain faktor transportasi, aktivitas penambangan pasir baik tradisional maupun ilegal menjadi ancaman antropogenik utama bagi kelestarian situs.

Eksplorasi pasir yang tidak teregulasi memicu perubahan morfologi dasar Sungai dan alterasi pola arus, yang berdampak pada sedimentasi ekstrem atau pengikisan fondasi deposit kapal. Fenomena ini menempatkan situs pada kondisi kritis, di mana prioritas ekonomi jangka pendek di sektor ekstraktif mulai mengompromikan integritas fisik dan nilai sejarah warisan budaya bawah air tersebut.

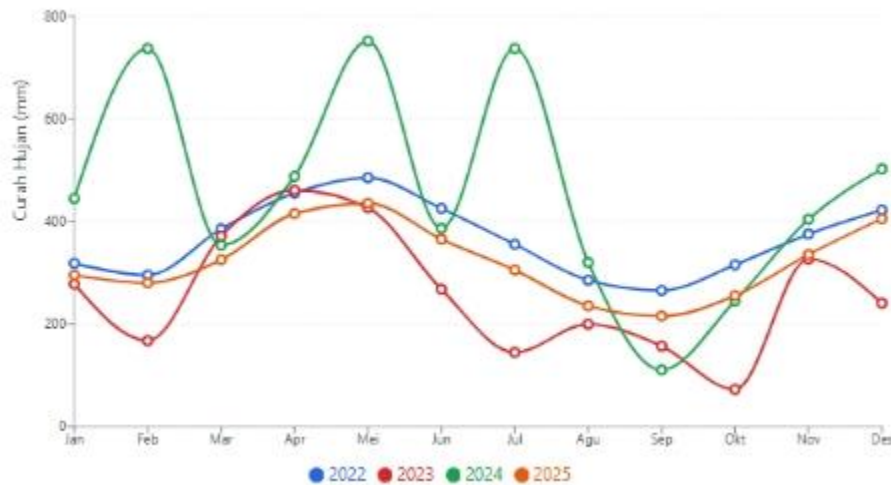
2.6 Iklim

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, kabupaten yang terletak di bagian Sulawesi Selatan ini secara geografis memiliki posisi strategis di wilayah tropis dengan karakteristik iklim yang khas, di mana curah hujan tinggi tercatat hampir sepanjang tahun dengan rata-rata jumlah curah hujan berkisar antara 2.500 hingga 3.500 milimeter per tahun. Wilayah ini tidak memiliki perbedaan musim kemarau dan hujan yang sangat kontras dibandingkan wilayah lain di Indonesia, sehingga sering disebut sebagai wilayah "Non-ZOM" atau Zona Tanpa Musim. Meskipun demikian, terdapat beberapa bulan yang menunjukkan angka curah hujan lebih tinggi dibanding periode lainnya, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, November, dan Desember, di mana curah hujan bisa mencapai lebih dari 300 milimeter per bulan dan seringkali disertai hujan lebat yang berlangsung dalam durasi waktu yang cukup panjang.

Tabel 1. Data Curah Hujan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2025

Bulan	2022(MM/HH)	2023(MM/HH)	2024(MM/HH)	2025(MM/HH)
Januari	318/20	277,70/19	444,50/18	295/19
Februari	295/18	167,10/15	736,90/24	280/18
Maret	385/22	370,90/26	353,20/24	325/21
April	455/24	460,70/24	487,60/27	415/23
Mei	485/26	426,10/20	751,50/29	435/25
Juni	425/23	267,50/25	386,20/26	365/22
Juli	355/21	144,30/26	736,80/30	305/19
Agustus	285/17	199,30/20	319,60/31	235/15
September	265/16	156,50/11	110,10/30	215/14
Oktober	315/19	72,20/11	245,00/31	255/17
November	375/21	326,30/19	403,90/30	335/20
Desember	422/24	240,30/19	501,90/31	405/24

Sumber: Penelitian, 2025



Gambar 7. Grafik Data Curah Hujan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2025

Intensitas curah hujan yang tinggi menimbulkan dilema geomorfologis yang kompleks bagi pelestarian Bangkai Kapal di dasar air di satu sisi, peningkatan volume air memicu akumulasi lumpur secara masif yang berisiko menimbun seluruh struktur kapal atau sedimentasi, sementara di sisi lain, energi kinetik arus yang meningkat drastis membawa material abrasif tajam yang secara konsisten mengikis integritas fisik logam kapal hingga mencapai ambang kehancuran. Dalam konteks Sungai Malili, dinamika destruktif ini mengalami eskalasi akibat adanya perubahan tata guna lahan di wilayah hulu, yang secara langsung menyebabkan aliran Sungai menjadi jauh lebih keruh, sarat akan beban sedimen, serta bersifat lebih agresif saat memasuki puncak musim penghujan.

2.7 Pendekatan yang Digunakan

2.7.1 Pendekatan Arkeologi Bawah Air

Arkeologi bawah air diterapkan sebagai metodologi ilmiah untuk mengkaji sisa-sisa peradaban masa lampau yang terendam di lingkungan perairan seperti laut, danau, atau Sungai. Pemilihan pendekatan ini berfungsi sebagai basis kerja untuk mengeksplorasi dimensi teknis situs, mengingat letak objek berada di ekosistem fluvial yang menuntut teknik dokumentasi khusus. Secara metodologis, pendekatan ini memfasilitasi analisis mendalam terhadap kekuatan struktur lambung, jenis material, hingga proses pembentukan situs yang dipengaruhi secara dinamis oleh sedimentasi dan arus Sungai. Dalam studi kasus kapal perang Jepang di Sungai Malili, objek tersebut diposisikan sebagai 'arsip material' yang menyimpan bukti teknologi dan taktik militer era Perang Dunia II. Penggunaan pendekatan ini krusial untuk menghasilkan data teknis yang akurat

mengenai degradasi fisik kapal, yang nantinya digunakan sebagai fondasi dalam menyusun manajemen risiko dan tindakan konservasi.

2.7.2 Pendekatan Arkeologi Lanskap Budaya

Penelitian ini menggunakan pendekatan lanskap budaya dengan premis bahwa situs arkeologi merupakan bagian tak terpisahkan dari ruang geografis yang bersifat dinamis. Fokus analisis diarahkan pada konteks keruangan serta interaksi timbal balik antara artefak dengan ekosistemnya. Penerapan metode ini bertujuan untuk mengungkap alasan keberadaan Bangkai Kapal perang Jepang di Sungai Malili serta pengaruhnya terhadap ekologi perairan dan pola perilaku masyarakat setempat dari masa ke masa. Dengan memadukan narasi sejarah militer dan geografi perairan, perspektif ini memungkinkan identifikasi hubungan antara sisa material kapal dengan strategi logistik Jepang. Oleh karena itu, upaya pelestarian Cagar Budaya dalam kerangka ini tidak hanya menasar aspek fisik objek, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap signifikansi ruang sejarah di sepanjang aliran Sungai Malili.

2.7.3 Pendekatan Arkeologi Maritime Cultural Heritage (MCHM)

Maritime Cultural Heritage Management (MCHM) merupakan paradigma multidisipliner yang memfokuskan diri pada identifikasi, perlindungan, dan pengelolaan berkelanjutan atas peninggalan budaya di ekosistem perairan. Pendekatan ini diterapkan sebagai instrumen strategis untuk mengonversi temuan ilmiah arkeologis ke dalam kebijakan pelestarian yang konkret di lapangan. Justifikasi pemilihannya berakar pada urgensi untuk mentransformasikan data teknis dan kontekstual menjadi rencana aksi yang memiliki landasan legal serta bersifat aplikatif. Dalam studi ini, MCHM digunakan untuk mereposisi Bangkai Kapal Jepang di Sungai Malili sebagai aset budaya bernilai tinggi yang dikelola melalui manajemen risiko yang komprehensif. Melalui kerangka ini, peneliti dapat menyelaraskan strategi pelestarian dengan perencanaan tata ruang serta melibatkan partisipasi multipihak (stakeholders). Implementasi MCHM memastikan bahwa pelestarian berkembang menjadi sistem manajemen yang terinstitusi dan adaptif, guna menjaga keberlanjutan situs sebagai simbol identitas maritim kawasan.

2.7.4 Pendekatan Arkeologi Publik

Pendekatan Arkeologi Publik digunakan dalam penelitian ini untuk menjembatani kepentingan akademik arkeologi dengan kebutuhan masyarakat lokal. Sebagaimana dikemukakan oleh Tanudirjo (2003), pengelolaan warisan budaya harus bersifat tanggap terhadap kepentingan publik. Dalam konteks Sungai Malili, Bangkai Kapal perang Jepang tidak hanya dipandang sebagai data material sejarah militer, tetapi juga sebagai bagian dari lanskap budaya dan identitas kolektif masyarakat Malili. Pendekatan ini menekankan bahwa pelestarian yang berkelanjutan hanya dapat

dicapai apabila masyarakat merasakan manfaat nyata baik secara edukatif, sosial, maupun ekonomi dari keberadaan situs tersebut.

